

TAHUN POLITIK: ANTARA DEMOKRASI PROSEDURAL-SUBSTANSIAL

Munawar Noor

mn10120@gmail.com

ABSTRAKSI

Demokrasi akan berpijak pada prinsip kesetaraan dalam arti bahwa setiap manusia setara; oleh karena itu tidak ada spesialisasi kelompok tertentu atau asumsi bahwa seseorang lebih terhormat daripada yang lain. Banyak pendapat menjadi wajar jika demokrasi kita terlibat (dilatih), sulit untuk menemukan standar batu loncatan dan arahnya, terutama dalam hal praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi hanya menyentuh aspek proseduralnya. Oleh karena itu, demokrasi harus mengatasi bentuk proseduralnya yang sekarang, meskipun proseduralnya sendiri tidak dapat dihilangkan tetapi demokrasi substansial mutlak diperlukan. Selama tahun 2018 banyak politisi atau pengamat menyebutnya sebagai tahun politik.

Mungkin alasannya adalah bahwa akan ada 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang dijadwalkan untuk menyelenggarakan pemilu secara bersamaan pada tahun 2018 dan 2019 Pemilihan Presiden, DPR, DPRD, DPD.

Kami semua bersama-sama mengharapkan bahwa kondisi ini dapat mendinginkan suhu politik setelah semua dinamika politik yang melelahkan.

Di sisi lain, kelas menengah kami yang secara teoritis merupakan kunci untuk menegakkan sistem demokrasi kini cukup mengkhawatirkan, karena terpecah-pecah dan terpolarisasi menjadi faksi-faksi yang terus menghujat dan saling menyalahkan. Kelas menengah ini adalah simpul kohesi sosial, juga kelas yang paling bertanggung jawab dalam mengamankan modal sosial masyarakat. Padahal di kelas menengah nasib demokrasi dipertaruhkan.

Kata kunci: Prosedural / substantif demokrasi, Tahun politik, polarisasi, kohesi sosial, modal sosial.

ABSTRACT

Democracy will stand on the principle of equality in the sense that every human being is equal; therefore there can be no specialization of a particular group or the assumption that one is more honorable than the other. Many opinions become natural if our democracy is implicated (trained), it is difficult to find a standard of stepping-stone and its direction, especially in terms of democratic practice in the life of nation and state. Democracy only touches on its procedural aspect. Therefore, democracy must overcome its present form of procedural, although the procedural itself cannot be eliminated but substantial democracy is absolutely necessary. During the year 2018 many politicians or observers call it a political year.

Perhaps the reason is that there will be 17 provinces, 39 cities and 115 districts that are scheduled to hold elections simultaneously in 2018 and

2019 Election of the President, DPR, DPRD, DPD.

We are all together expecting that this condition can be cooling down the political temperature after all the exhausting political dynamics.

On the other hand, our middle class which is theoretically the key to upholding the democratic system is now quite worrisome, as it is fragmented and polarized into factions that continue to blaspheme and blame each other. This middle class is a knot of social cohesion, as well as it is the most responsible class in securing the social capital of society. Whereas in the middle class the fate of democracy is at stake.

Keywords: Procedural / substantive of democracy, Political year, polarization, social cohesion, social capital.

A. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarahnya, teori dan praktik tentang demokrasi terpusat pada klaim-klaim yang saling berlawanan mengenai kekuasaan oleh kelompok-kelompok sosial (masyarakat) yang saling bersaing. David Held memulai karyanya *Models of Democracy* dengan mendefinisikan demokrasi sebagai “suatu bentuk pemerintahan di mana, pertentangan monarki dan aristokrasi, rakyatlah yang memerintah”. Itulah sejatinya demokrasi dilahirkan lalu diperjuangkan, agar rakyat tidak hanya menjadi penonton atas hiruk pikuk kehidupan bernegara, namun diberikan ruang untuk berperan aktif maupun pasif.

Tetapi hakikat demokrasi akhir-akhir ini kembali hangat dibicarakan di berbagai kalangan menjelang Pilkada dan Pilpres dalam rentang waktu tahun politik yang hiruk pikiknya sering membingungkan masyarakat dan tidak jarang memutarbalikkan logika demokrasi. Sejak awal menjadi kesadaran bersama bahwa pilihan atas demokrasi perwakilan memberikan kewenangan kepada wakil untuk mewakili seluruh prosedur dalam pemerintahan, namun secara substantif arah dari segala sesuatu yang diputuskan dalam demokrasi perwakilan itu adalah berdasarkan kepada kehendak rakyat. Artinya setiap wakil harus tau apa yang menjadi keinginan dari orang-orang yang diwakilinya, bagaimanapun kehendak pribadi dan kelompok harus tunduk kepada kehendak rakyat. Oleh karena itu logikanya menjadi aneh ketika lahir suatu undang-undang yang serta merta mendapatkan penolakan dari rakyat tetapi disepakati antara Pemerintah dan dewan Perwakilan Rakyat. Nampak jelas bagi masyarakat awam bahwa undang-undang itu dibuat tidak berdasarkan pada kehendak dari pemiliki kedaulatan yaitu

rakyat, tetapi hanya berisi ihwal kepentingan dari elit politik penguasa partai politik semata. Bagaimana mungkin, wakil mengambil keputusan namun tidak berdasarkan pada kehendak yang ia wakili, menandakan bahwa ada yang salah dengan demokrasi perwakilan kita.

Dalam konteks inilah, kita semua bisa melihatnya bersama dalam kasus revisi undang-undang D3, yang sah menjadi undang-undang dengan penuh drama. Setelah mendapatkan persetujuan bersama dari presiden dan DPR, dan walaupun Presiden tidak menandatangani akan tetap menjadi Undang-Undang sesuai ketentuan dalam UUD RI 1945 pasal 20 ayat 5.

B. Pembahasan

1. Memasuki Tahun Politik

Masyarakat menjadi penonton ketika elite-elite partai politik tampak sibuk dengan kader-kadernya yang maju sebagai calon pemimpin daerah untuk Pilkada Serentak 2018 setelah dipastikan ada 15 partai politik yang syah menjadi peseta pemilu oleh KPU. Begitu juga Pemilu 2019 yang menjadi titik kulminasi untuk menyiapkan tokoh-tokoh terkemuka dalam parpol untuk melenggang untuk menjadi anggota legislatif dan orang nomor satu di negeri ini yaitu Presiden. Baliho dan spanduk lengkap dengan bendera partai pengusung dan janji-janji maupun slogan yang lazim digunakan dalam tiap kontestasi rutin nampak dimana-mana, termasuk di dalamnya keperluan yang berhubungan dengan kelengkapan kampanye sebagai kebiasaan buruk politik uang alias *money politics*. Masyarakat dapat diartikan sebagai orang-

orang yang berada di luar istilah politik kekuasaan, tetapi mau tidak mau akan terkena imbasnya. Tetapi masyarakat (terutama generasi milenial *zaman now*) yang masih menaruh harapan pada perpolitikan negeri ini agar semakin baik ke depannya. Tulisan ini tidak mengajarkan untuk menjadi golput. Namun agar bijak memilih, dan tidak terjebak dengan permainan kasar politisi yang sudah pesat perkembangannya sejalan dengan era informasi.

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, ada beberapa hal berikut ini yang dapat kita lakukan dan hindari bersama dalam menghadapi kontestasi politik 2018-2019.

a. Pahami esensi Pemilu dan Pilkada.

Barangkali di antara kita banyak yang menjadi pemilih pemula, atau masih awam dalam Pemilu dan Pilkada. Cermati bahwa Pemilihan Umum (Pemilu), adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh penyelenggara negara untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam tataran nasional. Terutama pada legislatif, dengan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta eksekutif dengan memilih presiden dan wakilnya. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah kegiatan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, di kota/kabupaten dan provinsi domisili kita masing-masing. Pilihlah sesuai dengan hati nurani dan akal sehat dengan mempertimbangkan rekam jejak mereka dalam kepemimpinannya.

b. Kecanggihan Gadget

Canggihnya media sosial dan berbagai macam *gadget* atau gawai menjadi primadona di era globalisasi. Manfaatkan gadget sebaik mungkin dalam memanfaatkan berita janganlah menjadi bagian dari *buzzer*, dengan bijak menggunakan WhatsApp, Facebook, dan Twitter.

c. Saling menjagokan idola masing-masing silakan,

Akibat terhasut berita bohong memungkinkan iklim dunia maya ikut memanas, apalagi di dunia nyata sedang dalam situasi kontestasi politik. Untuk itu tak jarang perdebatan dalam kolom-kolom komentar Facebook, timeline Twitter, atau bahkan di grup-grup A berujung dengan saling hujat. Boleh menjagokan idola tetapi dengan bijak gunakan media-media yang ada dengan selalu mengedepankan objektivitas.

d. Waspadai isu SARA di Pemilu dan Pilkada

Isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang sering kali muncul di media sosial dalam tataran kontestasi politik menjelang Pemilu dan Pilkada. Dengan panasnya dunia maya maupun dunia nyata akan silih bergantinya hoax, isu SARA menjadi senjata primadona bagi para politikus *zaman now*. Kita memegang prinsip bahwa siapa pun orang Indonesia selama mampu memenuhi sumpah/janjinya sebagai pejabat publik yang berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial itu pilihan.

- e. Bangun situasi berbangsa, berteman, dan berkeluarga yang kondusif

Barangkali bagian ini menjadi peringatan serius bagi kita semua. Jangan sampai kontestasi Pilkada dan Pemilu membuat persatuan kita sebagai bangsa, teman, maupun keluarga terpecah belah. Keluarga, group WA misalnya bisa pecah karena perbedaan pilihan dalam politik. Kontestasi politik yang hanya lima tahunan sekali tidak perlu dicampurkan dengan urusan keluarga dan pertemanan yang ranahnya sangat jauh lebih personal. Bagaimana caranya supaya bisa terhindar, adalah dengan memisahkan urusan *heart-to-heart* dengan ranah publik. Jangan sampai kita campuradukkan, apalagi berujung pada perang saudara.

2. Demokrasi Substansial vs Demokrasi Prosedural

Pendapat Hanna Finkel Pitkin yang dikutip Drs. Arbi Sanit, ia mengatakan bahwa konsep perwakilan dalam artian bahwa seseorang mewakili orang lain pada hakikatnya adalah istilah modern. Yunani Kuno tidak mempunyai kata itu sekalipun warga negara kota tersebut memilih sejumlah pejabat dan kadang-kadang mengirim duta yang sesungguhnya merupakan kegiatan yang masa ini dikategorikan sebagai perwakilan (Sanit, 1985). Dari pernyataan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa menurut Pitkin, representasi sebenarnya tidak bisa disebut sebagai konsep demokrasi, karena keduanya berlainan.

Demokrasi biasanya dihubungkan dengan tradisi penyelenggaraan pemerintahan Yunani Kuno. Dimana secara sederhana dimaknai pemerintahan oleh rakyat banyak. Sedangkan representasi berakar dari sistem monarkhi di Inggris. Selain berawal dari sistem feodal, Konsep representasi memperoleh makna yang lebih luas dengan kehadiran agama Kristen (Sanit, 1985). Baik sistem feodal, parlemen di Inggris maupun praktek gereja yang merupakan cikal bakal representasi, ketiganya mencerminkan negasi secara substansial terhadap asas demokrasi kerakyatan seperti di Yunani. Jadi, secara filosofis dan historis, demokrasi dan representasi tidak bertemu.

Secara substansial, demokrasi mengandaikan sebuah abstraksi yang sulit diterjemahkan dalam prakteknya. Misalnya tata aturan pemerintahan yang mengandaikan bahwa yang menggerakkan negara adalah masyarakat negara secara keseluruhan. Secara mekanisme seturut dengan demokrasi Yunani Kuno, masyarakat negara-kota dikumpulkan di sebuah lapangan besar untuk menampung seluruh masyarakat dalam acara musyawarah terkait kebijakan yang diambil bersama oleh pemerintah negara-kota. Semua masyarakat mempunyai hak suara terkecuali perempuan, budak dan anak-anak. Hal ini menegaskan bahwa unsur inklusifitas seluruh komponen masyarakat kecuali yang telah disebutkan dalam demokrasi merupakan harga mati. Melibatkan peran

keseluruhan masyarakat dalam menentukan arah perjalanan negara, atau bagaimana sebuah kekuasaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara umum untuk menentukan kebaikan bersama.

Konsep di atas lambat laun akan sangat terasa abstrak sekali untuk bisa diwujudkan dalam praktek kehidupan politik kontemporer. Akhirnya, banyak yang mempertanyakan bagaimana prosedur kongkrit demokrasi substansial sehingga bisa mengimplementasikannya dengan baik.

Demokrasi perwakilan merupakan sebuah tawaran untuk menjawab skenario prosedural untuk mewujudkan demokrasi. Paling tidak terdapat tiga argumentasi mengapa sistem perwakilan itu muncul:

- a. Skala kepadatan nasional (jauh berbeda dengan tipe negara- kota di Yunani Kuno).
- b. Kompleksitas permasalahan yang membuat tidak semua orang memadahi mengakses informasi.
- c. Kebutuhan mengambil tindakan cepat pada situasi-situasi tertentu. Semisal situasi darurat perang dan sebagainya.

Jika boleh ditarik benang merah, demokrasi representasi merupakan sebuah upaya yang menerjemahkan demokrasi substansial melalui sebuah prosedur baku, seperti penyelenggaraan pemilu. Maka, demokrasi representasi biasa disebut sebagai demokrasi prosedural, atau ada yang

mengatakannya sebagai demokrasi standart minimal.

Proses demokrasi masih dimaknai dengan memenangkan kontestasi, dengan cara apa pun yang dianggap benar. Ukuran suksesnya pun sederhana yaitu tokoh yang diusung jadi pemimpin. Kualitas demokrasi yang demikian, tentu masih dari nilai hakiki demokrasi. Tetapi itu semua adalah praktik demokrasi yang tengah kita alami sebagai demokrasi yang sah secara prosedural walaupun dari kaca mata demokrasi substantif, masih jauh panggang dari api. Demokrasi substantif masih sebatas kerinduan, artinya mimpi untuk mencapai demokrasi yang berfokus pada kepentingan rakyat mungkin saja bisa terwujud. Namun syaratnya, para pihak perlu memastikan proses pemilu yang bebas dari politik uang dan kampanye negatif yang berisi ujaran kebencian serta membawa isu SARA.

Para calon kepala daerah, calon anggota legislatif, serta calon presiden dan wakil presiden pun harus menyadari kehadiran mereka adalah untuk kepentingan bangsa. Bukan sekadar kepentingan partai pengusung dan kelompok pendukungnya. Salah satu ukuran demokrasi substantif adalah hadirnya kebijakan politik yang imparisial yaitu berkerakyatan, menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, berkeadilan, dan memiliki perhatian khusus terhadap rakyat yang kurang beruntung. Terperangkapnya kita semua dalam jebakan praktik demokrasi prosedural ini, tidak dapat dilepaskan gagalnya parpol melaksanakan Undang-

Undang Parpol, khususnya pendidikan politik terhadap masyarakat maupun kadernya yang dipandang masih lemah dalam proses kaderisasi. Artinya pada setiap pileg kita bisa menyaksikan bagaimana parpol kekurangan kader yang layak untuk dijadikan calon legislator. Rekrutmen dalam waktu yang pendek, pada akhirnya memunculkan kader instan dari figur-figur populer, tapi minus ideologi partai bahkan tak sedikit yang tidak begitu paham dengan politik.

Dalam hal ini juga banyak terjadi waktu pilkada, banyak parpol kekurangan kader yang layak diusung menjadi calon kepala daerah akibatnya terjadi calon kdepala daerah bersaing dengan kotak kosong. Memang di beberapa daerah muncul tokoh nonparpol yang bagus reputasinya, yang kemudian didukung parpol. Tapi harus diakui, masih lebih banyak figur yang diusung parpol adalah tokoh yang memiliki kemampuan untuk memikul biaya politik dalam kemenangan pilkada. Munculnya figur seperti ini jelas aromanya adalah transaksional.

Kelangkaan figur dan gagalnya parpol dalam melakukan kaderisasi ini disinyalir oleh ICW sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi politik. Mereka yang terpilih secara transaksional, melakukan korupsi untuk menarik kembali modal politik yang sudah dikeluarkan ketika menjadi caleg atau pun calon kepala daerah. Pada akhirnya integritas parpol yang tercoreng dengan pola rekrutmen dan kaderisasi model seperti ini.

C. PENUTUP

Realitas politik dewasa ini menjadikan masyarakat awam

bingung dalam memaknai realitas yang nyata atau maya. Mana yang asli atau mana yang manipulatif dalam dunia yang melebur penuh kegaduhan yang disumbang dan dibangun oleh para politisi. Konflik yang berkembang di media sosial menjadikan kita semua prihatin betapa mudahnya aktor termasuk elit politik dan simpatisan politik menuliskan umpatan, makian, dan kata-kata kotor lainnya hanya untuk mengungkapkan perbedaan pandangan, pendapat bahkan orientasi politiknya yang seolah tanpa norma dan aturan. Walaupun sesungguhnya makna politik bagi politisi yang memiliki integritas tidaklah senaif dan sedangkal yang dipersepsikan dan diaktualisasikan oleh sebagian besar politisi kita pada umumnya.

Berbicara yang baik terkait politik yang dilakukan oleh masyarakat dan terutama politisi akan senantiasa hadir dalam ruang dan waktu dalam beragam konteks kepentingan. Seorang politisi yang telah mampu berbicara baik, hakikatnya telah melakukan personal branding bagi dirinya termasuk bagi partainya. Akhirnya menumbuhkan reputasi baik bagi diri, partai bahkan bagi hadirnya Indonesia yang lebih baik.

Semoga bermanfaat..... bagi kita sebagai warga bangsa....

Daftar Pustaka

- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kesetabilan, peta politik dan pembangunan*, CV Rajawali, Jakarta, 2011
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985
- CTS Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1085
- Haris Munandar (Penyunting) *Pembangunan Politik, Situasi Global Dan HAM (Kumpulan essai untu menghormati Prof,*

Miriam Budiharjo) Gramedia,
Jakarta, 1994
Mahfud MD, *Pergaulan Politik Dan
Hukum Di Indonesia*, Gama
Media, Yogyakarta, 1999